

TINJAUAN ATAS PROSEDUR PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PNBP RS. Dr. SUYOTO KEMENTERIAN PERTAHANAN

Oleh

Myranda Casey

Abstrak

PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang dimana seluruh PNBPN yang telah diterima wajib langsung disetor dalam kas negara. Penerimaan yang diterima dalam kementerian atau setiap lembaga negara lainnya yang tidak boleh dialihfungsikan untuk membiayai kegiatan operasional Institusi tersebut. PNBPN suatu hak yang menjadi suatu hak negara dalam tahun anggaran harus segera dimasukkan dalam APBN.

Tujuannya adalah agar mengetahui bagaimana dengan keadaan Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan dengan PNBPN, apakah menapatkan hasil yang baik untuk pemerintah sendiri atau mungkin sebaliknya. secara keseluruhan mungkin jika PNBPN dilakukan pada Satker yaang sudah BLU, PNBPN sendiri dapat berjalan dengan baik. tapi jika PNBPN sendiri di berlakukan kepada Organisasi yang masih belum BLU, sebaiknya segera untuk dijadikan untuk memiliki Satker sendiri. karena terlalu banyak kelemahan jika PNBPN dilakukan hanya pada Subsatker.

Kesimpulan yang didapat dari Praktek Kerja Lapangan Pada Rs. Dr. Suyoto adalah dimana penerapan sistem PNBPN sangat tidak disarankan dan memiliki kelemahan. karenaRs. Dr. Suyoto sendiri merupakan organisasi dalam bidang Kesehatan yang disediakan oleh Kementerian Pertahanan yang dimana merupakan sebuah Subsatker dibawah kendali PUSREHAB. Kelemahan tersebut juga bisa dilihat dengan bagaimana cara penyusunan RKA-K/L, Penerimaan dan Pengeluaran sampai Pelaporan dilakukan dengan secara manual. karena aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan sendiri hanya memberikan fasilitas kepada yang berwenang.

Kata Kunci: PNBPN, RKA-K/L, Penerimaan dan Pengeluaran, Pelaporan

REVIEW OF PLANNING, IMPLEMENTATION AND REPORTING OF PNBP RS. Dr. SUYOTO MINISTRY OF DEFENSE

By

Myranda Casey

Abstract

PNBP is all central government revenues that do not originate from tax revenues, where all PNBPs that have been received must be deposited directly in the state treasury. Receipts received in the ministry or any other state institution that may not be used to finance the operational activities of the Institution. PNBPs are rights that become a state right in the fiscal year and must be immediately included in the State Budget.

The aim is to find out what the state of Revenue and Expenditure is done with PNBPs, whether obtaining good results for the government itself or maybe vice versa. Overall, if PNBPs are carried out at the Satker already BLU, PNBPs themselves can run well. But if the PNBPs themselves are applied to an organization that is still not BLU, it should be immediately made to have its own Satker. Because there are too many disadvantages if PNBPs are done only on the Subsatker.

The conclusions obtained from the Job Training in RS. Dr. Suyoto is where the implementation of the PNBPs system is not recommended and has weaknesses. Because of the RS. Dr. Suyoto itself is an organization in the Health sector provided by the Ministry of Defense which is a Subsatker under the control of PUSREHAB. This weakness can also be seen by how to compile RKA-K / L, Receipts and Expenditures until Reporting is done manually. Because the application made by the Ministry of Defense itself only provides facilities to the authorities.

Keywords: PNBPs, RKA-K / L, Receipts and Expenditures, Reporting